

---

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KOTAYASA, KECAMATAN SUMBANG, KABUPATEN BANYUMAS

<sup>1</sup>Chamid Sutikno\*, <sup>2</sup>Muhammad Yusuf

<sup>1</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

---

### **Abstract**

*The purpose of this research was to describe the implementation process in Kotayasa Village, Sumbang District, Banyumas Regency. This study uses a descriptive method with a qualitative approach, to broadly describe a problem in research conducted based on the answers to the problem. The data collection techniques used in this study are: interviews, observation and documentation. To test the validity of the data, researchers used a source triangulation technique, namely by checking the data that had been obtained through several sources. From the research results it can be seen that the implementation of the Family Hope program is in accordance with existing rules and policies. For the various actors currently involved, starting from PKH assistants at the sub-district level and at the village level, good communication and coordination have been established. The factor that has been a problem in implementing the Family Hope program is to improve the quality of human resources to increase the level of education*

### **Keywords:**

*Policy Implementation, Family Hope Program*

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses implementasi di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk menggambarkan secara garis besar suatu masalah dalam penelitian yang dilakukan berdasarkan jawaban atas masalah tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dari hasil penelitian terlihat bahwa pelaksanaan program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan aturan dan kebijakan yang ada. Untuk berbagai aktor yang terlibat saat ini, mulai dari pendamping PKH di tingkat kecamatan dan di tingkat desa telah terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk peningkatan taraf pendidikan.

### **Article history:**

Submission March 16 2023

Revision May 10 2023

Accepted May 19 2023

Published June 30 2023

### **\*Corresponding author**

Email:

[chamidsutikno@gmail.com](mailto:chamidsutikno@gmail.com)

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan

---

---

**PENDAHULUAN**

Implementasi suatu kebijakan seiring datang dari munculnya program yang bersifat secara publik melalui masalah harus dirumuskan, diidentifikasi, dianalisis terlebih dahulu sebelum menuju tahapan pelaksanaan dari suatu kebijakan yang ditetapkan (Theoria Stiftelsen. 2017). Tahapan implementasi kebijakan menjadi salah satu tahapan yang harus dijalankan seiring dengan adanya kebijakan yang diberlakukan (Agustino, Leo. 2017). Keputusan yang disepakati bersama menjadi salah satu pedoman dan arahan bagi pemerintah dan para pihak terkait dalam menjalankan kebijakan di tengah-tengah masyarakat (Arizzo. 2017). Secara umum implementasi suatu kebijakan merupakan penerapan dari regulasi dan prosedural yang dikelola dan dijalankan oleh para pihak yang sangat berpengaruh dalam proses implementasi serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab secara khusus dalam melaksanakan segala kebijakan-kebijakan dari suatu program yang dikeluarkan (Asna Aneta. 2016).

Faktor lain juga sebagai penentu dan berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan ialah tertuju pada perilaku dan budaya organisasi dari para pihak pelaksana dalam proses implementasi kebijakan program (Lane1, Jan Erik and Wallis, Joe, 2017). Proses implementasi menjadi salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam suatu program dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan bagi para pemangku kepentingan dengan prioritas mewujudkan tujuan yang bersifat secara publik (Francois, 2019). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan program menitikberatkan pada nilai-nilai norma, ideologi, desain kelembagaan sebagai bahan arahan bagi para aktor internal maupun eksternal yang bekerjasama dalam satu tujuan dan mampu melakukan berbagai langkah strategis pendekatan untuk memastikan pelaksanaan suatu program yang diimplementasikan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan secara bersama (Micheal, Ezugwu Chigozie. 2019).

Parameter keberhasilan pelaksanaan kebijakan dari suatu program dialah dampak dan pengaruh dapat terlihat secara langsung dari kebijakan yang dilaksanakan dalam mencapai suatu tujuan dimasyarakat (Babatunde, Binoyo. 2019). Satu hal yang menjadi aspek dalam proses implementasi kebijakan ialah aspek operasional yang secara umum kebijakan diartikan menjadi suatu tindakan ataupun regulasi yang bertujuan untuk memecahkan berbagai masalah yang bersifat publik. Secara khusus implementasi kebijakan menjadi salah satu langkah yang strategis dalam menjalankan segala kebijakan untuk mewujudkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien (Stewart Jenny. 2018).

Dalam implementasi kebijakan suatu program diperlukan manajemen strategi yang mampu meminimalisir kegagalan dari implementasi kebijakan yang diharapkan mampu memungkinkan besar pencapaian keberhasilan dari kebijakan program melalui berbagai konteks dan konten yang direncanakan secara jelas dan prosedural sesuai dengan regulasi dan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya (Kusumanegara Solahuddin, 2010). Salah satu proses implementasi kebijakan yang dapat diterapkan dilingkup publik yaitu terkait dengan permasalahan masyarakat di sektor publik, khususnya dalam penerapan kebijakan program penanggulangan kemiskinan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan dengan optimal dan bahkan terus mengalami perkembangan dilingkungan masyarakat. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang terus menerus berkembang yang menjadi perhatian utama dalam sektor sosial yang belum terselesaikan dengan baik dan harus diselesaikan secara bertahap di masyarakat. Permasalahan mengenai kemiskinan yang ada di Indonesia secara umum merupakan bentuk masalah yang sudah lama terjadi tidak bisa menemukan solusi dalam memecahkan masalah yang terjadi (Kwong, Yan Wai. 2019).

Dapat diartikan bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah yang bersifat umum yang memungkinkan mudah untuk diatasi namun karena masalah yang begitu kompleks dan berkembang dengan lama sehingga mengakibatkan permasalahan tersebut sulit diatasi dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Secara khusus pemerintah Indonesia sudah berupaya melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk memecahkan masalah kemiskinan akan tetapi masalah kemiskinan yang ada di masyarakat sampai sekarang masih banyak masyarakat yang masih mengalami kemiskinan diberbagai daerah (Umar dan Zulkarnain. 2018). Kebijakan yang telah dibentuk dan diberlakukan secara umum belum mampu berjalan optimal dan belum berdampak secara menyeluruh (Sahi, Nirmala Afrinti, Taufiqurokhman, And Andriansyah. 2019). Berikut data jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2018 – 2020.

**Tabel. 1. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2018 - 2020**

Bulan dan Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)	% Jumlah Penduduk
Maret (2018)	25,95	9,82
Maret (2019)	25,14	9,41
Maret (2020)	26,42	9,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2019

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miski di Indonesia pada bulan maret tahun 2018 berjumlah 25,95 juta orang atau 9,82 persen. Pada bulan Maret tahun 2019 mengalami penurunan kemiskinan yaitu menjadi 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen. Dan pada bulan Maret tahun 2020 mengalami kenaikan di negara indoensia yang mencapai 26,42 juta jiwa atau 9,78 persen (Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2019). Provinsi Jawa Tengah juga mengalami permalahan lebih tepatnya di Kabupaten Banyumas. Berikut data jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2018 – 2020 di kabupaten Banyumas dengan berdasarkan garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin.

**Tabel. 2. Garis Kemiskinan, jumlah, dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2020**

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2018	366 442	226,20	13,50
2019	385 140	211,60	12,53
2020	406 250	225,80	13,26

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk yang masih berada di garis kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 berjumlah 226,20 ribu atau 13,50 persen. Pada tahun 2019 berjumlah 211,60 ribu atau 12,53 persen dan mengalami penurunan terhadap jumlah penduduk miskin. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan terhadap jumlah penduduk miskin sebesar 225,80 ribu atau 13,26 persen yang terbilang cukup drastis (Banyumas, 2021). Secara umum Kabupaten Banyumas termasuk dalam kabupaten dengan jumlah kemiskinan terbanyak di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020. Hal ini terjadi kenaikan terhadap penduduk yang mengalami kemiskinan dimasyarakat diakibatkan adanya faktor-faktor lain yang disebabkan dari internal maupun eksternal, salahsatunya adanya pandemi Covid- 19 yang mayoritas seluruh wilayah indonesia terdampak dengan adanya pandemi tersebut. Dampak yang terjadi seperti terkena PHK dikarenakan perusahaan yang menjadi tempat bekerja tidak dapat beroperasi secara maksimal bahkan ada yang menutup perusahaannya untuk sementara waktu. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 adalah sebesar 225,80 (ribu) atau sekitar 13,26 %. Kabupaten Brebes adalah sebesar 308,78 (ribu) atau sekitar 17,03% (Musa, Umar Farouk. 2019).

Kecamatan Sumbang adalah salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Banyumas dengan tingkat kemiskinan yang terbilang tinggi dan masyarakatnya banyak menerima manfaat dari program keluarga harapan (PKH). Jumlah keluarga miskin yang berada di kecamatan Sumbang mendapatkan program keluarga harapan sebesar 4797 penerima manfaat pada tahun 2021 (Sumber: SP2d PKH, 2021). Salah satu desa yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan banyaknya masyarakat yang menerima manfaat dengan adanya program PKH adalah Desa Kotayasa. Desa Kotayasa termasuk salah satu desa yang berada di kecamatan sumbang dan termasuk dalam tingkat penduduk yang sebagian besar masyarakatnya menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) berjumlah 1082 KPM di tahun 2022. Mulainya program PKH yang diimplementasikan di Desa Kotayasa sejak tahun 2013-2018, tingkat penduduk angka kemiskinan yang berada di desa tersebut masih tergolong tinggi, hal ini dikarenakan adanya program PKH yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat. Berikut data terkait dengan jumlah penerima manfaat PKH yang ada di Kecamatan Sumbang Tahun 2022.

**Tabel. 3. Jumlah penerima PKH di Kecamatan Sumbang Tahun 2022**

No.	Desa	Jumlah Penerima KPM
1.	Banjarsari Kulon	332
2.	Banjarsari Weta	262
3.	Banteran	680
4.	Datar	408
5.	Ciberem	288
6.	Gandatapa	697
7.	Karang Cegak	188
8.	Karang Gintung	330
9.	Karang Turi	197
10.	Kawungcarang	79
11.	Kebanggaan	323
12.	Kedungmalang	155
13.	Kotayasa	1082
14.	Limpakuwus	618
15.	Silando	177
16.	Sumbang	479
17.	Susukan	357
18.	Tambaksogra	430
19.	Sikapat	403

Sumber data: SP2d PKH, 2022

Dapat diinformasikan dari sajian data diatas menunjukkan bahwa jumlah penerima PKH khususnya di Kecamatan Sumbang tahun 2022 sebesar 7.485 KPM, Kecamatan sumbang menjadi salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah di Kabupaten Banyumas yang termasuk dalam penerima program bantuan PKH. KPM PKH dari 19 desa yang berada dikecamatan sumbang desa Kotayasa berjumlah 1082 KPM PKH. Sejak dimulainya program PKH di Desa Kotayasa, Dalam pelaksanaannya jumlah penerima program PKH disebutkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan terhadap jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM , hal ini diperlukan implementasi kebijakan terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2022 di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas seiring dengan banyaknya penduduk yang mengalami kemiskinan dan termasuk dalam wilayah yang memiliki tingkat prioritas perhatian utama untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan sesuai dengan aturan, regulasi dan prosedural yang telah ditetapkan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif dan interaktif (B. Miles et al., 2014). Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif yang berbasis pada proses implementasi yang dalam ini adalah implementasi kebijakan dari Program Keluarga Harapan di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas (B. Miles et al., 2014). Dalam penelitian Pengumpulan data dengan berbagai langkah seperti wawancara, observasi dan dokumentasi (Morgan, 2017). Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purpose sampling* (Hektner et al., 2012: Nathan & Scobell, 2012). Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis interaktif (B. Miles et al., 2014) yang secara umum mempunyai untuk menganalisis penelitian pertama dan mendesain ekplanatori untuk menganalisis mengenai penelitian kedua (Cresswell&cresswell 2018). Sasaran penelitian ini terdiri Unsur Pemerintah Desa Kotayasa, Koordinator PKH Kecamatan Sumbang, Pendamping PKH Desa Kotayasa dan masyarakat penerima bantuan PKH. Pemilihan Para informan dilakukan secara *purpose sampling* sesuai dengan tujuan penelitian yang diharapkan (Cresswell&Cresswell. 2018a). Dalam Validitas data penelitian ini menggunakan triangulasi data sumber dan dokumen (Cresswell&Cresswell. 2018a).

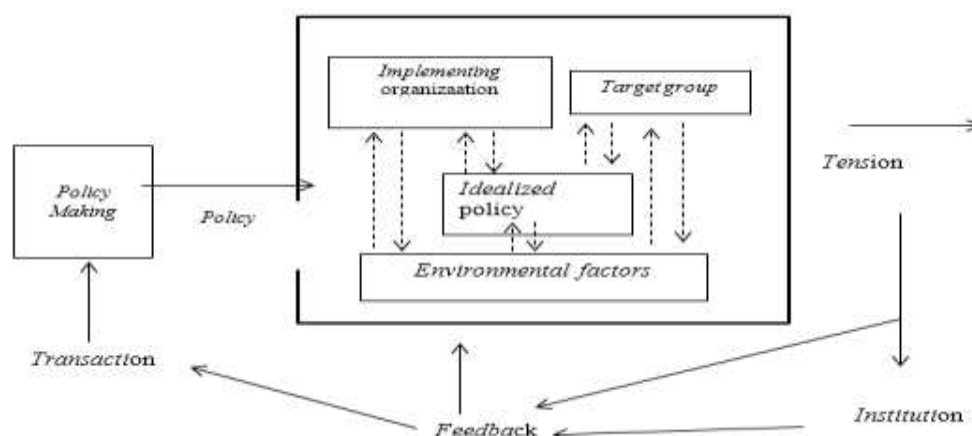
## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan suatu pemahaman atas dasar kepentingan publik yang dilaksanakan dengan berbagai tahapan dalam suatu program seperti agenda setting, perumusan masalah, implementasi, evaluasi, formulasi, reformulasi sampai dengan terminasi (Lane1, et. Al. 2017). Kebijakan publik menjadi salah satu

serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai aktor ataupun lembaga dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan untuk memfasilitasi kepentingan urusan masyarakat secara luas melalui implementasi kebijakan program (Anderson, 2017). Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan dalam proses kebijakan yang dilakukan secara dinamis yang sesuai dengan struktur dan sistem administrasi pemerintah secara relevan (Asna Aneta. 2016). Implementasi kebijakan dapat dikategorikan sebagai tahapan lanjutan dari segala tindakan pemerintah yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti lembaga eksekutif, legislatif atau lembaga peradilan sebagai fungsi pengarah dalam mencapai suatu tujuan (Philip, Dahida Deewua. 2019).

Subjek dari program yang akan dilaksanakan sangat berpengaruh dan memiliki tugas tersendiri sesuai dengan prosedur pelaksanaan kebijakan (Arizzo, 2019). Implementasi menjadi suatu tahapan yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan dengan pendekatan secara prosedural dalam organisasi (Savard, 2019). Terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi alasan dari keberhasilan suatu implementasi kebijakan public, diantaranya yaitu: *viability, theoretical integrity, scope, capacity, dan unintended consequences*. Dalam mencapai keberhasilan dan kegagalan terdapat 6 variabel pokok yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan implementasi kebijakan dalam suatu program pemerintah kepada subjek program. Ke-enam variabel tersebut diantaranya adalah: 1). Kejelasan terhadap tujuan maupun sasaran program; 2). Adanya pedoman kajian literatur dalam perumusan kebijakan; 3). Adanya dasar hukum yang relevan dalam melakukan implementasi kebijakan program; 4). Adanya rasa sikap Komitmen dan kompetensi dari para pihak pelaksana; 5). Dukungan penuh terhadap pemegang kekuasaan; 6). Keseimbangan kondisi masyarakat. (Sabatier, 2017).



**Gambar 1. Kerangka Implementasi Kebijakan**  
sumber: *Thomas B Smith, 1973*

Dalam melaksanakan kebijakan program yang sifatnya publik mencakup beberapa komponen yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam mendalami masalah publik, 3 aspek implementasi kebijakan program menurut Smith yang meliputi *Idealized Policy*, *Target Group*, *Implementing Organization*, dan *Environmental factors*. Dari masing-masing komponen tersebut dapat memberikan informasi dan fakta secara relevan mengenai pelaksanaan kebijakan program kepada objek program. Kebijakan publik menjadi salah satu rujukan yang melibatakan berbagai macam aktor seperti pemerintah, masyarakat maupun swasta dalam suatu pembahasan permasalahan ataupun memfasilitasi masyarakat dalam berbagai kepentingan yang sifatnya umum. (Anderson, 2017).

Secara umum implementasi kebijakan bergerak secara dinamis yang tetap berpedoman pada regulasi maupun struktural yang relevan secara legal. Implementasi kebijakan terdiri dari berbagai macam program yang disepakati secara bersama dalam suatu kepentingan bersama. (Babatunde, Binoyo. 2019). Implementasi kebijakan dilakukan pada program yang sifatnya penting dan berpengaruh atas perubahan kehidupan yang dinamis dimasyarakat dapat dilakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Peran yang dimiliki dari masing masing aktor dapat dikelola berdasarkan dengan kemampuan dan kesanggupan dalam proses implementasi kebijakan (Arizzo. 2019). Artinya dalam proses Implementasi kebijakan selalu diprioritaskan yang mencakup aspek secara tidak langsung berpengaruh baik terhadap kebijakan publik. (Savard. 2019).

### **Program Keluarga Harapan (PKH)**

Kebijakan pengentasan kemiskinan adalah salahsatu bentuk program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan masalah kemiskinan. Berbicara mengenai kemiskinan sudah berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangnya, namun secara keseluruhan belum sepenuhnya dapat tercapai secara maksimal. Kemiskinan sampai saat ini masih terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah di Indonesia. Kemiskinan tersebut telah membuat banyak warga masyarakat dan jutaan anak tidak dapat mengenyam pendidikan, kesehatan serta kebutuhan hidup yang layak (Kalimba. 2019). Kemiskinan merupakan suatu ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial yang meliputi modal produktif atau asset, sumber keuangan, pengetahuan dan keterampilan serta informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Leaung, et al. 2019). Artinya masalah hidup masyarakat dapat dijamin oleh pemerintah yang termasuk dalam golongan masyarakat miskin telah menetapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi dan menurunkan angka masalah



kemiskinan. Langkah pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan adanya perlindungan sosial untuk masyarakat secara luas.

Skema bantuan sosial merupakan skema bantuan yang bertujuan untuk menyediakan sumber daya minimum bagi individu dan rumah tangga yang hidup di bawah standar penghasilan tertentu tanpa mempertimbangkan aspek kontribusi dari penerimanya (Normaliza, A.M & Kamarulazizi Ibrahim. 2020). Skema bantuan sosial dapat difokuskan kepada kelompok target tertentu seperti keluarga miskin dengan anak, hingga penduduk lanjut usia dengan penghasilan terbatas. Program bantuan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengurangan kemiskinan (Routhe Aaron S. et al. 2016). Bantuan sosial yang diberikan dalam program bansos tidak tergantung kepada kontribusi dari penerima manfaatnya. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung dalam bentuk uang (In-Cash Transfers), dan juga dalam bentuk barang dan pelayanan (In-Kind Transfers). Bantuan sosial sifatnya tertuju untuk penduduk yang mempunyai kerentanan dalam kemiskinan (Normaliza, A.M & Kamarulazizi Ibrahim. 2020).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Kebijakan nasional ini dibuat dalam rangka untuk mengurangi angka kemiskinan melalui adanya program yang berbasis keluarga. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program Keluarga Harapan merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sejak tahun 2007 sebagai upaya pengembangan sistem perlindungan sosial. (Kemensos, 2020) Dalam penelitian ini, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2022 di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, dianalisis berdasarkan *idealized policy, target groups, implementing organization, Environmental factors*.

Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu tujuan dari program PKH sudah sesuai dengan tujuan dari pemerintah diantaranya membantu meringankan beban pengeluaran bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM), meningkatkan taraf pendidikan dasar dan peningkatan di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, program PKH sudah selanjutnya dapat dilanjutkan supaya tujuan dari Negara Indonesia dapat segera tercapai. Kebutuhan KPM di Desa Kotayasa khususnya di bidang pendidikan masih kurang dikarenakan ada KPM yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta dimana setiap bulannya ada iuran wajib yang harus dibayarkan, sedangkan kebutuhan di bidang kesehatan para KPM sudah merasa tercukupi karena mereka dapat berobat secara gratis di faskes yang telah ditentukan.

Respon penerima bantuan terhadap program yaitu menerima kehadiran program PKH dan mereka merasa senang karena dapat terbantu dalam hal

pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam hal penyaluran bantuan masih mengalami kendala yaitu pada saat penyaluran dana bantuan dari pusat kadang belum sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, akan tetapi secara keseluruhan proses penyaluran dana bantuan PKH di Desa Kotayasa sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil pengumpulan data serta analisis peneliti dan wawancara secara mendalam terkait komitmen dan perubahan pola pikir peserta PKH di Desa Kotayasa dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan komitmen dan pola pikir peserta PKH harus didukung dengan sikap produktif secara sosial dan ekonomi.

### *Idealized policy*

*Idealized policy* adalah suatu langkah dengan melakukan pendekatan bersifat menyatukan kesamaan mengenai kebijakan terhadap suatu program yang berlaku secara relevan terhadap suatu persoalan yang terjadi dalam suatu kelompok. Kinerja organisasi yang dilakukan oleh berbagai unsur struktural dipengaruhi oleh adanya pemimpin untuk menjaga kesinambungan dan kestabilan organisasi secara efektifitas jalannya organisasi dalam mengelola suatu program. (Nwagboso, Chris. 2019). Pada aspek kebijakan yang ideal ini bertujuan untuk menyesuaikan pencapaian tujuan dengan landasan seiring dengan kebijakan yang ditetapkan. Salah satunya bentuk kebijakan yang diimplementasikan kedalam pemerintah yang berbasis pada sektor sosial masyarakat yaitu implementasi kebijakan pada Program Keluarga Harapan di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Secara umum dalam proses implementasi kebijakan mengenai Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas sudah memiliki berbagai kebijakan yang mengatur dan mengelola program tersebut, diantaranya Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

Dalam proses pelaksanaan Kebijakan suatu program pemerintah yang melingkupi ruang publik salah satunya pada program keluarga harapan berupa bantuan sosial kepada masyarakat secara umum memiliki desain kelembagaan tersendiri yang mampu memberikan dampak perubahan yang akan dicapai. Faktor penentu wujudnya suatu perubahan dipengaruhi adanya Desain kelembagaan pemerintah mengenai suatu kebijakan program yaitu implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan. Tujuan adanya desain ini untuk menentukan pelaksanaan kebijakan mengenai program keluarga harapan dimasyarakat sesuai dengan strategi yang direncanakan. Desain kelembagaan yang dilakukan terhadap kebijakan dalam Program Keluarga Harapan di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dilakukan secara terbuka. Dengan sistem koordinasi dan komunikasi dengan berbagai lembaga yang turut serta dalam pelaksanaan

implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan secara bersama-sama melaksanakan kebijakan tersebut memberi dampak perubahan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam pembangunan ekonomi secara mandiri sesuai dengan regulasi dan aturan yang telah ditetapkan. Melihat adanya regulasi berupa kebijakan yang dikeluarkan mulai dari peraturan menteri sampai pemerintah daerah menandakan adanya pola koordinasi dan komunikasi yang dibangun mulai dari level pemerintah pusat sampai dengan lingkup pemerintah daerah yang terstruktur baik secara internal.

### *Target groups*

Dalam aspek *target group* menjadi salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dalam suatu program untuk membantu mewujudkan pencapaian tujuan dari kebijakan untuk masyarakat. Aspek *target group* adalah kelompok sasaran yang menjadi subjek kebijakan program untuk mendapatkan manfaat secara penuh baik jangka pendek, menengah dan panjang. Kompetensi dimaknai sebagai salah satu kemampuan seseorang dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan yang ada dan menampilkan kelebihannya yang berdasarkan atas pengetahuan, keahlian dan sikap (Emron *et al*, 2019). Dalam proses pelaksanaan kebijakan suatu program yang dalam hal ini tertuju pada program keluarga harapan dilaksanakan sesuai dengan sistem dan peraturan terhadap koordinator dan Pendamping PKH yang dilakukan kepada kelompok masyarakat sebagai penerima bantuan program.

Kelompok sasaran kebijakan Program Keluarga Harapan ialah masyarakat yang termasuk dalam penerima bantuan kelompok masyarakat secara bersyarat. Dari hasil penelitian ini yang dilakukan di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas pemerintah dan para pihak yang berkepentingan dalam mengelola dan mengatur pelaksanaan kebijakan kepada kelompok masyarakat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan kelompok masyarakat yang menerima bantuan mampu merasakan dampak positif dan memberikan perubahan kesejahteraan ekonomi dalam keluarganya. Secara umum pelaksanaan kebijakan pada Program keluarga harapan di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas mayoritas menerima bantuan program yang dilatarbelakangi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya seiring dengan penghasilan rendah yang belum mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi dimasyarakat.

Adanya program pemerintah pada sektor sosial memberikan pergerakan perubahan secara bertahap dalam memutus laju garis kemiskinan secara luas dan merata. Rencana-rencana yang dirumuskan secara tidak langsung memberikan

langkah strategi dalam implementasi kebijakan pada Program Keluarga Harapan di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Permasalahan kemiskinan yang tidak kunjung menurun menunjukkan pelaksanaan berbagai program yang dilakukan secara bertahap kepada kelompok sasaran dalam pengentasan kemiskinan belum mampu mencapai dampak perubahan positif bagi kesejahteraan ekonomi dimasyarakat. Ketidakmampuan yang terjadi dimasyarakat menjadi beban pemerintah tersendiri untuk mengatasi permasalahan secara tuntas, hal ini perlu dilakukan bagi pemerintah dalam membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkala ialah memetakan penyebab adanya permasalahan kemiskinan yang berkembang secara komperhensif melalui pendataan masyarakat mulai dari kelompok-kelompok sosial dan praktisi sosial.

### *Implementing organization*

Aspek *implementin organization* merupakan suatu aspek dalam organisasi dengan model pendekatan yang dapat membermudah pengembangan program terhadap kelompok sasaran dalam mewujudkan kebijakan dapat tercapai sesuai dengan harapannya. Peran organisasi dalam kontek kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program yang diimplementasikan untuk memberikan informasi pelaksanaan kebijakan secara terperinci dan mengadopsi berbagai langkah strategi dengan prioritas keberhasilan program yang bersifat publik. Para pihak yang terlibat dalam skema pelaksanaan program menjadi daya dukung keberhasilan program yang secara organisasi dapat disebut sebagai suatu lembaga yang memiliki supra struktur dan infrastruktur tersendiri dalam menanggapi permasalahan yang sedang dihadapi.

Kebijakan yang ditetapkan memberikan arah pergerakan suatu organisasi dalam menjalankan segala aktivitas proram yang direncanakannya untuk menentukan arah kebijakan melalui kekuasaan secara interaksional dalam pengambilan keputusan yang bersifat publik. Dengan ini, artinya kebijakan mengarahkan kepada para pihak yang tergabung dalam lingkup organisasi atau kerjasama untuk melakukan tindakan secara sistematis dalam mencapai suatu tujuan bersama. Sehingga, dapat dipahami hubungan antara kedua makna tersebut bersumber pada konsep kekuasaan *power* dan *policy* merupakan hasil dari interaksi kekuasaan antar *stakeholders*.

Proses implementasi kebijakan pada program Program Keluarga Harapan di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas memerlukan berbagai pihak ataupun lembaga yang turut serta menjalankan program yang berbasis pada kepentingan publik. Implementasi kebijakan pada program selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Robbins dan Judge (2017), bahwa keterlibatan kerja dalam suatu program baik individu maupun kelompok diartikan sebagai suatu pekerjaan yang terdiri dari berbagai macam unsur yang disatukan dan turut serta

---

membantu proses berjalannya suatu program salah satunya ialah program dalam implentasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas seperti pemerintah kabupaten ataturpun desa, dinas sosial maupun lembaga swasta lain yang tergabung dalam lingkup kerjasama dalam pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan dilingkungan masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga penerima manfaat secara bersyarat.

### *Environmental factors*

Aspek lingkungan merupakan aspek yang tergolong dalam faktor eksternal yang melibatkan komponen-komponen dari luar sebagai fungsi dukungan yang berpengaruh terhadap penentu keberhasilan kebijakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Dalam perspektif kebijakan aspek lingkungan menjadi langkah upaya yang dilakukan melalui pendekatan-pendekatan secara interaktif dengan memperhatikan budaya dan sosial yang berkembang secara menyeluruh ditengah-tengan aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa adanya pertentangan dengan masyarakat. Kebijakan program yang dilakukan pemerintah dalam mengkondisikan permasalahan yang berkembang secara terus menerus menjadikan implementasi kebijakan pada program keluarga harapan tidak terlepas dari adanya berbagai faktor sebagai pendorong ataupun pendukung seperti faktor lingkungan bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya sampai dengan bidang pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Banyumas khususnya Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang yang dalam hal ini termasuk salah satu desa penerima bantuan program terbanyak sebagai sasaran objek penelitian dalam Implementasi kebijakan diperlukan sosialisasi sebagai ajang edukasi mengenai pemahaman pembangunan ekonomi keluarga untuk melepaskan garis kemiskinan secara bertahap. Dengan pembangunan ekonomi ini sebagai Faktor ekonomi dalam penanganan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan untuk menambah penghasilan dalam mencukupi kebutuhan hidup dimasyarakat dan mampu mengembangkan bantuan secara maksimal.

Pendorong permasalahan kemiskinan yang berkembang dimasyarakat terdapat salah satu faktor yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat dalam membangun kesejahteraan ekonomi ialah pendidikan. Faktor pendidikan menjadi salah satu fungsi pendorong yang dapat memberikan harapan bagi setiap keluarga dalam menanggapi permasalahan kemiskinan dalam lingkup kecil. Dengan adanya program keluarga harapan, bidang pendidikan yang cukup rendah dimasyarakat menjadi salah satu komponen yang diberikan pendanaan supaya setiap masyarakat dapat mencapai pendidikan tinggi dengan harapan kedepannya sebagai pionir keluarga dalam

membangun kesejahteraan ekonomi ditengah-tengah masyarakat seiring dengan adanya implementasi kebijakan program keluarga harapan.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pada program keluarga harapan pada aspek *Idealized policy* dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap aturan-aturan, regulasi maupun prosedural yang dibentuk secara sistematis sebagai role model kelembagaan yang struktural dalam penyelesaian masalah kemiskinan dimasyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti peraturan nasional dan peraturan daerah yang dijadikan dasar implementasi kebijakan program keluarga harapan yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan secara bertahap dan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

Pada Aspek *Target group* implementasi kebijakan program dimulai dari membentuk pemahaman dan kesadaran masyarakat kearah perkembangan pemikiran secara luas agar dapat memanfaatkan bantuan koordinator Program dan pendampingan kelompok kerja serta kelompok masyarakat penerima manfaat. *Implementing organization*, yaitu para pihak yang turut serta mendukung dan mendorong pelaksanaan kebijakan keluarga harapan di masyarakat dengan jalur komunikasi dan koordinasi secara integritas yang sesuai dengan regulasi dan prosedural program seperti unsur masyarakat, pemerintah dan sektor swasta. *Environmental factors* dilakukan dengan pendekatan-pendekatan secara interkatif dengan memperhatikan budaya dan sosial kondisi masyarakat sebagai pemahaman dalam melaksanakan kebijakan Program Keluarga Harapan. Pembangunan ekonomi level keluarga menjadi salah satu langkah upaya dalam keluarga dan bidang pendidikan menjadi harapan utama sebagai pionir dalam memerangi permasalahan kemiskinan yang terjadi dimasyarakat.

## REFERENSI

- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Cv Alfabeta. Bandung.
- Andersson Annika Lantz et.al. 2015. *What's the problem? Meaning making and learning to do mathematical word problems in the context of digital tools Annika*. Published online: 25 January 2008. Department of Education, LinCS, Goteborg University, 300, 405 30 Goteborg, Sweden.
- Arizzo. (2017). *Public Policy Implementation, Research Project: Literature Review*. Tennessee State University Department of Public Administration.
- Asna Aneta. (2016). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No.

- 1 Thn. Universitas Negeri Gorontalo
- Babatunde, Binoyo. (2019). *Effect of Poverty Reduction Programmes on Economics Development Evidence from Nigeria.* Arabian Journal of Bussines Nad Management Review (OMAN Chapter), Vol 4, No 1 Pp 26 -37
- B. Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2019. *Qualitative Data Analysis* - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña - Google Books. In Sage Publications.
- Creswell, & Creswell. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* - John W. Creswell, J. David Creswell - Google Books. In SAGE Publications, Inc.
- Kalimba, Edmond, Jaya Sukhla & Mbabazi Mbabazize. (2019). *Effect of Credit Management System on Financial Performance of Development Bank in Rwanda: Case Study of Development Bank of Rwanda, The International Journal of Business & Management*”, Vol 4 No 4
- Kusumanegara Solahuddin, (2010). Model dan aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Gava Media. Yogyakarta.
- Kwong, Yan Wai. (2019). *A Review of the Impacts of Agenda-sett.* *Journal of Communication and Education*, 2(2). Communication Research Centre, Department of Journalism and Communication, Hong Kong Shue Yan University, Hong Kong
- Lane1, Jan Erik and Wallis, Joe. (2017). *Non-profit organizations in public policy implementation.* *Journal of public administration and policy research* Vol. 1(7) pp. 141-149. University of Freiburg, 79098 Freiburg im Breisgau, Germany.
- Leaung, et al. (2019). *Support for Policies to Improve the Nutritional Impact of the Supplemental Nutrition Assistance Program in California.* *American Journal of Public Health*, Vol 105, No.8
- Madani Muhlis (2017). Dimensi Interkasi Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Morgan, D. L. 2017. *Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach.* In *Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach.* <https://doi.org/10.4135/9781544304533>
- Nathan, A. J., & Scobell, A. 2019. *Experience sampling method: Measuring the quality of everyday life.* In *Foreign Affairs* (Vol. 91, Issue 5).
- Normaliza, A.M & Kamarulazizi Ibrahim. (2020). *Poverty Reduction for Sustainable Development: Malaysia's Evidence-Based Solutions.* *Global Journal of Social Sciences Studies*, Vol. 3, No. 1, P 29 – 42.
- Philip, Dahida Deewua. 2018. *Public Policy Making and Implementation in Nigeria: Connecting the Nexus.* *Public Policy and Administration Research.* Vol.3, No.6. Department of Public Administration, University of Abuja, P.M.B 117 Abuja-

Nigeria.

- Routhe Aaron S. et al. (2016). *Using Theory to Understand Public Support for Collective Actions that Impact the Environment: Alleviating Water Supply Problems in a Nonarid Biome*. *Social Science Quarterly*, Volume 86, Number 4, December 2005.
- Savard, Francois Jean. *With the collaboration of R. Banville*. (2017). "Policy Cycles," in L. Cote and J.-F. Savard (eds.), *Encyclopedic Dictionary of Public Administration*.
- Stewart Jenny. (2018). *Public policy as information*. *School of Business*, University of New South, Wales, Canberra, Australia, 2013. Vol.31, No. 1. Sumber, <http://dx.doi.org/10.1080/08109028.2013.763630>.
- Theoria Stiftelsen. (2017). *Philosophy and Public Policy*. Published by Blackwell Publishing, 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK, and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA.
- Umar, Zulkarnain. (2018). Model Implementasi Kebijakan serta Strategi Terhadap Pendekatan Kebijakan Publik. *Jurnal baca Vol VIII, No IV*. Program Studi Ilmu Administrasi. Universitas Islam Makasar. Hal 282.
- Sahi, Nirmala Afrinti, Taufiqurokhman, And Andriansyah. (2019). *Policy Implementation of The Family Hope Program in Empowering the Poor In Bone Bolango District*. (January). Doi: 10.4108/Eai.1-4-2019.2287277.